



# RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN 2023



PEMERINTAH  
KOTA BEKASI

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renja ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi setiap organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Dalam penyusunan Renja Perubahan ini di uraikan rencana Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan. Selain itu, juga dijelaskan tentang Akuntabilitas Kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik target Renja pada 2 (dua) tahun sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang. Renja ini berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan maupun kegagalan Instansi Pemerintah dalam menjalankan tujuan pokok dan fungsinya.

Kami menyadari, tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, pendapat, dan kritik demi penyempurnaan Renja untuk masa yang akan datang. Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan Renja ini.

Bekasi,

2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BEKASI,**

  
**NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE**  
Pembina Tk. I (IV.b)  
NIP. 19740708200212 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II .....	11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU .....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol .....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi.....	33
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .....	55
BAB III .....	59
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI.....	59
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol .....	63
3.3 Program dan Kegiatan .....	65
BAB IV .....	78
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023 .....	78
BAB V .....	83
PENUTUP .....	83
A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan .....	83
B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	85
C. Rencana Tindak Lanjut .....	85

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2020.....	17
<b>Tabel 2.2</b>	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2021.....	22
<b>Tabel 2.3</b>	Pencapaian Kinerja SKPD pada Tahun 2020.....	35
<b>Tabel 2.4</b>	Pencapaian Kinerja SKPD pada Tahun 2021.....	36
<b>Tabel 2.5</b>	Rekapitulasi Data Rumah Ibadah di Kota Bekasi.....	38
<b>Tabel 2.6</b>	Rekapitulasi Permasalahan Keagamaan di Kota Bekasi.....	38
<b>Tabel 2.7</b>	Rekapitulas Permasalahan Kerawanan Sosial di Kota Bekasi Tahun 2021.....	42
<b>Tabel 2.8</b>	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.....	45
<b>Tabel 2.9</b>	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.....	55
<b>Tabel 3.1</b>	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dalam Pelayanan.....	60
<b>Tabel 4.1</b>	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2023.....	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi dalam menyusun Renja sangat memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol periode 2018-2023. Adapun Kepala Daerah Kota Bekasi terpilih periode 2018-2023 adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”**. Dari visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam 5 (lima) misi Kepala Daerah terpilih yaitu:

- 1) Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
- 3) Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
- 5) Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dari ke-5 misi tersebut, Badan Kesbangpol sangat terkait erat dengan misi ke-5. Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Bekasi memberikan penugasan untuk memberikan pelayanan publik yang terkandung di dalam misi ke-5 Kepala Daerah terpilih.

Misi 5 Kepala Daerah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk tujuan-tujuan pembangunan daerah, yang beberapa diantaranya adalah sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Tujuan yang dimaksud adalah **“Mewujudkan Kota Bekasi yang Tertib dan Aman”**.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah tersebut, Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol disusun. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol merupakan salah satu alat di dalam menjalankan roda pemerintahan pada Badan Kesbangpol. Renja ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam melakukan perencanaan dan keuangan pembangunan. Renja ini berfungsi sebagai panduan (*Guidance*) tahunan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersifat urusan (langsung) pada Badan Kesbangpol.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan di dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Kesbangpol sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi juga mengacu kepada perundang-undangan tersebut.

Dalam melakukan penyusunan Renja, Badan Kesbangpol selalu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang memiliki kompetensi di dalam mendukung penyusunan renja ini. Proses penyusunan ini Renja ini dimulai dengan mengajukan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah pada tahun 2023 kepada Bappelitbangdaa Kota Bekasi sebagai operator utama perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang diajukan oleh Badan Kesbangpol merujuk kepada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023, Renstra Badan Kesbangpol 2018-2023, usulan-usulan kecamatan yang diaring melalui Musrenbang tingkat kecamatan serta masukan dari Forum Perencanaan Tingkat Perangkat Daerah.

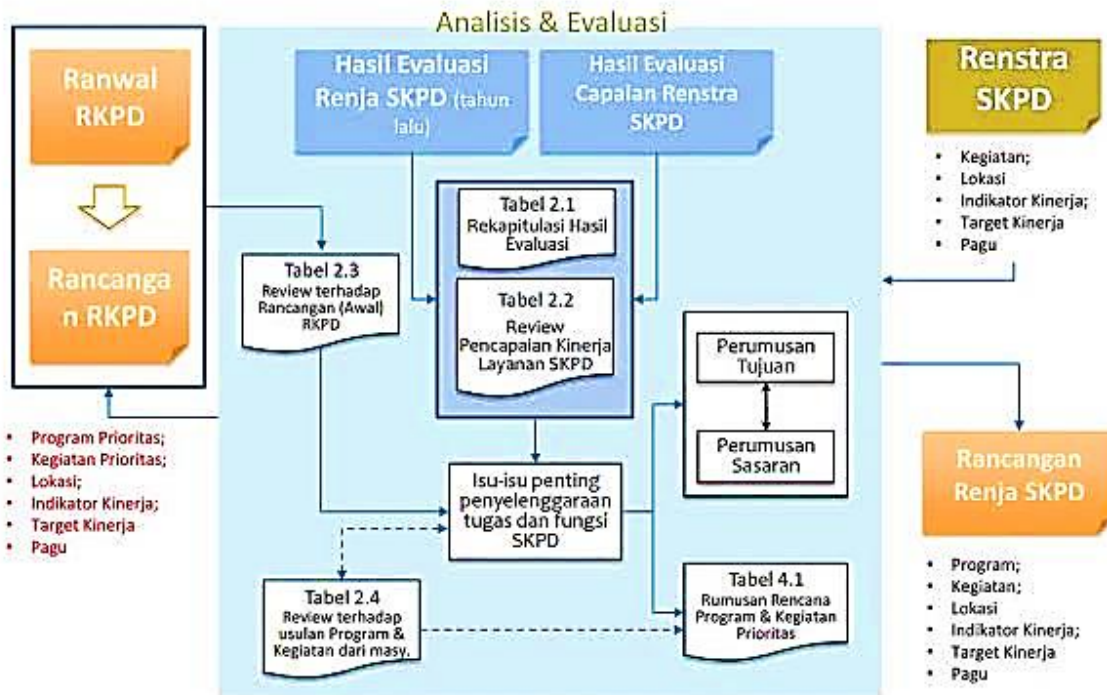
Forum Perencanaan Tingkat Perangkat Daerah merupakan forum pembahasan perencanaan Badan Kesbangpol tertinggi. Peserta forum ini terdiri dari unit kerja yang ada di lingkungan Badan Kesbangpol, organisasi/komunitas yang bekerjasama dengan Badan Kesbangpol hingga kecamatan yang memiliki keselarasan kegiatan dengan Badan Kesbangpol. Forum ini kemudian melakukan finalisasi penyusunan program dan kegiatan prioritas tingkat Perangkat Daerah. Hasil dari forum ini menjadi usulan program dan kegiatan Badan Kesbangpol.

Usulan program dan kegiatan Tahun 2023 Badan Kesbangpol tersebut kemudian disatukan dengan usulan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah lain dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi untuk dibahas ke dalam Pra Musrenbang Kota Bekasi. Dalam forum ini terjadi proses telaah analitik mengenai daftar program dan kegiatan RKPD untuk disempurnakan. RKPD yang telah disempurnakan tersebut kemudian dibawa ke dalam forum Musrenbang tingkat Kota Bekasi untuk disahkan dalam

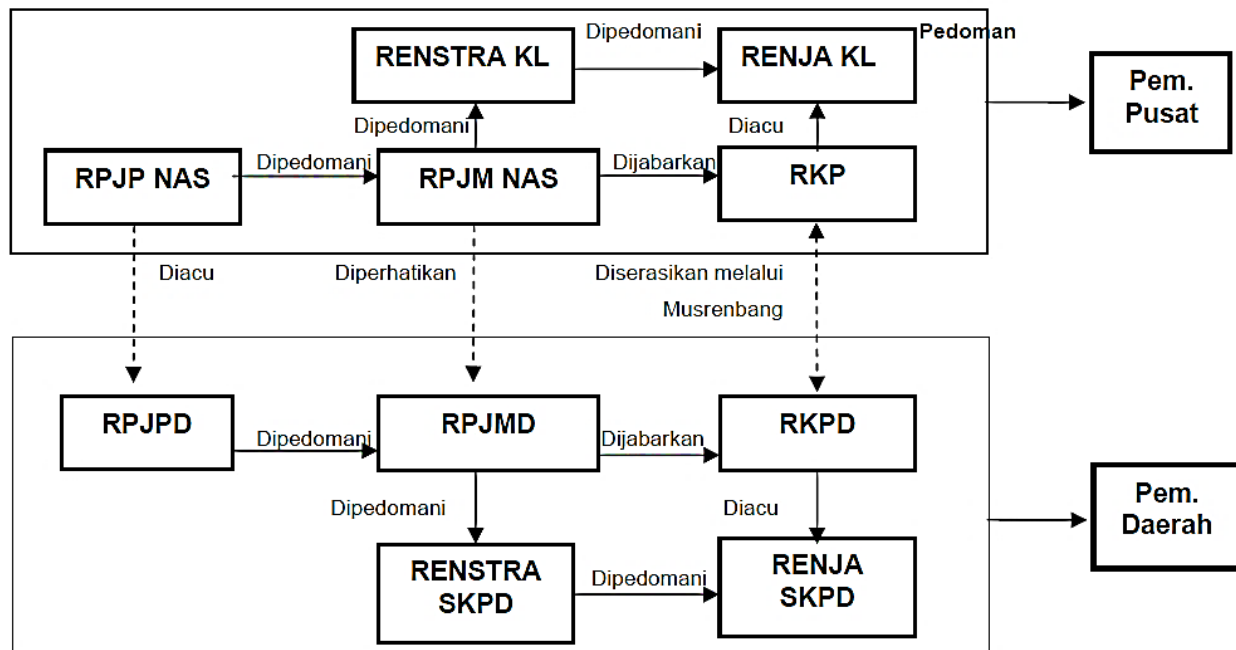
bentuk penandatanganan berita acara Musrenbang. Hasil dari Musrenbang tingkat Kota ini merupakan finalisasi program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah.

**Gambar 1.1 Keterkaitan Renja PD dengan RKPD**

## ANALISIS DAN EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD



Pada Renja ini juga akan dijelaskan terkait prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang memiliki keterkaitan dengan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan politik. Salah satu prioritas pembangunan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Jawa Barat adalah pengutan fungsi deteksi dini di wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat melalui sinkronisasi Sistem Informasi Situasi dan Kondisi Daerah (SIKONDA). Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat melakukan peningkatan kapasitas fungsi deteksi dini di Kota Bekasi melalui kerjasama deteksi dini dengan Provinsi Jawa Barat.

**Gambar 1.2 Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov**

Langkah yang dapat dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi terkait peningkatan kapasitas deteksi dini di wilayah Kota Bekasi adalah dengan melakukan kolaborasi kinerja fisik dengan Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi kegiatan dapat dilakukan dengan pembagian data pantau wilayah dan pemetaan wilayah rawan konflik.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Renja Badan Kesbangpol Tahun 2023 didasarkan kepada :

- Landasan Ideologi Pancasila;
- Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;

Landasan operasional, terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invesntarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Seri E);
24. Peraturan Daerah Perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 Oktober 2023;
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 53 Seri E);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 53 Seri E);
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Petunjuk

- Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 18 Seri E);
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 27.A Seri E);
  29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 82 Seri E).
  30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 129 Tahun 2021 Seri D);
  31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kesbangpol disusun dengan maksud untuk memberikan panduan dan arah bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Badan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Renja Badan Kesbangpol ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparatur Badan Kesbangpol. Renja ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan yang dijalankan Badan Kesbangpol sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari Renja Badan Kesbangpol, adalah:

- a. Merumuskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol dalam jangka tahun 2023 agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien;
- b. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pelaksanaan kegiatan yang hendak dicapai dalam tahun 2023;
- c. Menetapkan pedoman (*input, output dan outcome*) dalam melaksanakan kegiatan tahunan Badan Kesbangpol;
- d. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir dari organisasi.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. BAB I adalah PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
2. BAB II adalah EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESBANGPOL TAHUN 2021. Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program serta kegiatan masyarakat;

3. BAB III adalah TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional terkait bidang kerja Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah.
4. BAB IV adalah RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V adalah PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tahun 2018-2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Badan Kesbangpol untuk melaksanakan pembangunan di Kota Bekasi.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bekasi pada dasarnya bermuara dari visi yang telah digariskan oleh Wali Kota terpilih. Visi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan menjadi landasan konseptual di dalam melakukan perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran. Indikator tersebut antara lain:

1. Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
2. Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan;
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik;
4. Persentase Ormas yang Berpreranan Aktif dalam Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan dalam proses perumusan Renja Badan Kesbangpol adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara menyeluruh yang dikaitkan dengan empat komponen indikator sasaran tersebut.

Kondisi daerah Kota Bekasi terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari indikator sasaran sebagai berikut:

### 1. Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Salah satu misi pembangunan Walikota yang dibebankan ke dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi ke-1, yaitu **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik”**. Dalam mendukung misi tersebut Badan Kesbangpol Kota Bekasi menetapkan indikator sasaran Nilai AKIP Bakesbangpol dengan menargetkan perbaikan serta peningkatan kualitas mutu pelayanan perangkat daerah Bakesbangpol. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator sasaran kinerja tersebut adalah dengan **“Mengoptimalkan peningkatan Adminitrasi, SDM, Sarana dan Prasana, serta pelaporan kinerja”**. Pada tahun 2021, indikator ini menetapkan target **“Bb”** dengan kategori **“Sangat Baik”** sebagai bentuk peningkatan Akuntabilitas pelayanan pada Bakesbangol Kota Bekasi.

### 2. Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan

Salah satu misi pembangunan Walikota yang dibebankan ke dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi ke-5, yaitu **“Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota yang Aman dan Cerdas, Serta Lingkungan Hidup yang Nyaman”**. Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikator sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi sebagaimana yang tertera di dalam sub judul. Salah satu upaya untuk menekan kasus Perselisihan SARA adalah dengan menurunkan jumlah gangguan Kantrantibmas dan Pelanggaran Ketertiban di Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut adalah dengan **“Peningkatan kesatuan bangsa dengan pemantapan ideologi nasional melalui Pembauran Kebangsaan, Peningkatan Kewaspadaan Nasional dengan pencegahan serta memfasilitasi penanganan Konflik Sosial dan Pemantapan Kerukunan Masyarakat dalam menjaga ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi”**. Pada tahun 2021, indikator ini menetapkan target **“Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan”** yang terjadi di Kota Bekasi. Indikator ini menargetkan bahwa kejadian permasalahan perselisihan SARA yang terjadi di Kota Bekasi harus diselesaikan 100%.

### 3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai juga perlu dikembangkan dari sisi peningkatan kondusifitas di



masyarakat. Terkait hal tersebut Pendidikan Politik ini sangat diperlukan demi terciptanya iklim masyarakat yang kondusif, santun dan beretika dalam mendukung stabilitas dan keberlangsungan roda pemerintahan dan kehidupan sosial di Kota Bekasi. Dengan adanya Pendidikan Politik, masyarakat Kota Bekasi akan mengalami peningkatan kesadaran dan kesantunan di dalam berpolitik. Kesadaran dan kesantunan di dalam berpolitik dari masyarakat akan berimplikasi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan warga terkait segala tahapan kebijakan dan keputusan dalam ranah politik. Indikator ini menargetkan situasi masyarakat Kota Bekasi yang aktif dalam memberikan aspirasi serta berdemokrasi melalui penyampaian pendapat baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada pemerintah sebagai bentuk partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi di Kota Bekasi.

#### **4. Persentase Ormas yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah**

Kerukunan masyarakat yang terjalin baik dan kondusif sampai saat ini diimbangi dengan pembangunan daerah dalam seluruh aspek kehidupan dari berbagai bidang tidak terlepas dari peranan suatu kelompok/perkumpulan suatu organisasi yang terdiri dari berbagai latar belakang. Kota Bekasi sebagai daerah dengan perkembangan yang cepat sangat membutuhkan pendampingan peran serta dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu bentuk upaya dalam mencapai indikator sasaran tersebut melalui fasilitasi peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah melalui berbagai bidang diantaranya Pendidikan, Keagamaan, Kebudayaan, Sosial Kemasyarakatan, Sosial Kontrol dan lain hal. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang setiap tahun bertambah banyak dapat dijadikan dorongan percepatan pembangunan daerah disisi lain pemerintah memberikan pembinaan untuk menghindarkan gesekan antar kelompok yang bermotif demi mencapai tujuan atau kepentingan masing-masing kelompok dan tidak untuk masyarakat luas.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021, pelaksanaan kinerja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ditunjang dengan Belanja Langsung Penunjang Urusan dan Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah, dengan ruang lingkup kerjanya sebagai berikut :

## 1. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

Belanja Langsung Penunjang Urusan Badan Kesbangpol Kota Bekasi dianggarkan sebesar Rp. 10.885.639.050 dan sampai dengan Bulan November 2021 terealisasi sebesar Rp 8.909.989.692 (81,85%) dan untuk realisasi kinerja mencapai 95,83%. Adapun perincian Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### ✓ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sebagian besar realisasi kegiatan dan Sub Kegiatan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

## 2. Belanja Langsung Urusan (BLU)

Sampai dengan bulan November 2021, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terdapat perubahan pagu anggaran yang berimplikasi kepada perubahan target capaian indikator pada setiap kegiatan dan sub kegiatan Belanja Langsung Urusan Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang dianggarkan sebesar Rp. 5.554.695.900 terealisasi sebesar Rp. 4.978.046.600 (89,61%) dan untuk realisasi kinerja mencapai 97.91%. Adapun perincian Belanja Langsung Urusan (BLU) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- ✓ **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**  
Program ini sampai dengan Bulan November Tahun 2021 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 69,32%. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
    - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- ✓ **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**  
Program ini sampai dengan Bulan November Tahun 2021 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
    - Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

✓ **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program ini sampai dengan Bulan November Tahun 2021 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

✓ **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Program ini sampai dengan Bulan November Tahun 2021 mencapai realisasi kinerja sebesar 0% dan realisasi anggaran sebesar 0%. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan, antara lain:

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

✓ **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini sampai dengan Bulan November Tahun 2021 mencapai realisasi kinerja sebesar 91,66% dan realisasi anggaran sebesar

80,97%. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
  - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Sebagian dari pagu kegiatan terdapat refocusing pada anggaran perubahan, hal tersebut mempengaruhi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga memberikan dampak kepada kurang optimalnya pencapaian target sesuai yang telah ditentukan.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2020  
 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kota Bekasi  
 (Rencana Strategis Tahun 2018-2023)**

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4.01 . 4.01.05 . 33	<b>Program Pengelolaan Pemerintahan Umum</b>										
4.01 . 4.01.05 . 33 . 04	Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah	Jumlah pantauan kewaspadaan dini daerah	1.150 Pantauan	200 Pantauan	200 Pantauan	200 Pantauan	100%	200 Pantauan	600 Pantauan	57.17%	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 03	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional	Jumlah sub kegiatan	12 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	0	0%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	16.66%	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 01	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Jumlah peserta pendidikan politik	600 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	300 Orang	50.00%	
4.01 . 4.01.05 . 01	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>										
4.01 . 4.01.05 . 24 . 01	Pembinaan Bela Negara	Jumlah peserta workshop bela negara	800 Orang	0 Orang	100 Orang	0	0%	150 Orang	150 Orang	18.75%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4.01 . 4.01.05 . 24 . 02	Sinergitas Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan sinergitas masyarakat dengan Pemda	12 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	33.33%	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya: - Alat tulis kantor: 84 Bulan	Tersedianya: - Alat tulis kantor: 12 Bulan	Tersedianya: - Alat tulis kantor: 12 Bulan	Tersedianya : - Alat tulis kantor: 12 Bulan	100%	Tersedianya: - Alat tulis kantor: 12 Bulan	Tersedianya: - Alat tulis kantor: 36 Bulan	42,85%	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya layanan cetakan dan penggandaan	Terbiayainya : - Barang cetak: 100 jenis barang - fotocopy: 382.775 lembar; - Penjilidan 403 Buku	Terbiayainya a: - Barang cetak: 16 jenis barang - fotocopy: 74.685 lembar; - Penjilidan : 43 Buku	Terbiayainya : - Barang cetak: 15 jenis barang - fotocopy: 102.745 lembar; - Penjilidan : 50 Buku	Terbiayainya a: - Barang cetak: 15 jenis barang - fotocopy: 102.745 lembar; - Penjilidan : 50 Buku	100%	Terbiayainya: - Barang cetak: 12 jenis barang - fotocopy: 105.315 lembar; - Penjilidan: 75 Buku	Terbiayainya: - Barang cetak: 43 jenis barang - fotocopy: 282.745 lembar; - Penjilidan: 168 Buku	73,82%	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya bahan bacaan dan	Tersedianya:	Tersedianya:	Tersedianya:	Tersedianya :	100%	Tersedianya: - Koran: 2500 examplar;	Tersedianya: - Koran: 7300 examplar;	39,44%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daera h dan /Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catata n
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Perundang-Unda ngan	peraturan perundang- undangan	- Koran: 18.500 exemplar; - Buku peraturan perundan gan : 10 buku	- Koran: 2300 exemplar; - Buku peratura n perundan gan : 2 buku	- Koran: 2300 exemplar; - Buku peraturan perundan gan : 0 buku	- Koran: 2500 exemplar ; - Buku peratura n perunda ngan : 0 buku		- Buku peraturan perundangan : 0 buku	- Buku peraturan perundanga n : 2 buku		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya: - Air mineral gallon : 3362 gallon; - Gula : 1104 kg; - Kopi: 889 boks; - Teh: 883 pak; - Kue kering toples: 712 kg; - Snack: 6260 dus; - Makan: 6267 box	Tersedianya: - Air mineral gallon : 450 gallon; - Gula : 135 kg; - Kopi: 95 boks; - Teh: 150 pak; - Kue kering toples: 100 kg; - Snack: 775 dus; - Makan: 725 box	Tersedianya: - Air mineral gallon : 456 gallon; - Gula : 114 kg; - Kopi: 89 boks; - Teh: 90 pak; - Kue kering toples: 102 kg; - Snack: 775 dus; - Makan: 600 box	Tersedianya : - Air mineral gallon : 456 gallon; - Gula : 114 kg; - Kopi: 89 boks; - Teh: 90 pak; - Kue kering toples: 102 kg; - Snack: 775 dus;	100%	Tersedianya: - Air mineral gallon : 456 gallon; - Gula : 135 kg; - Kopi: 141 boks; - Teh: 123 pak; - Kue kering toples: 140 kg; - Snack: 942 dus; - Makan: 942 box	Tersedianya: - Air mineral gallon : 1362 gallon; - Gula : 384 kg; - Kopi: 325 boks; - Teh: 363 pak; - Kue kering toples: 342 kg; - Snack: 2492 dus; - Makan: 2267 box	38,68%	



Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						- Makan: 600 box					
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1280 kali perjalanan dinas	160 kali perjalanan dinas	160 kali perjalanan dinas	160 kali perjalanan dinas	100%	160 kali perjalanan dinas	480 kali perjalanan dinas	37,50%	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya honor Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	Terbiayainya : - Honor TKK : 60 bulan;	Terbiayainya : - Honor TKK : 12 bulan;	Terbiayainya : - Honor TKK : 12 bulan;	Terbiayainya : - Honor TKK : 12 bulan;	100%	Terbiayainya: - Honor TKK : 12 bulan;	Terbiayainya: - Honor TKK : 36 orang;	60%	
4.01 . 4.01.05 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Terpeliharaan - Pemeliharaan mobil: 9 unit; - Pemeliharaan motor: 10 unit	Terpeliharanya: - Pemeliharaan mobil: 8 unit; - Pemeliharaan motor: 5 unit	Terpeliharanya: - Pemeliharaan mobil: 8 unit; - Pemeliharaan motor: 5 unit	Terpeliharanya: - Pemeliharaan mobil: 8 unit; - Pemeliharaan motor: 5 unit	88,98%	Terpeliharanya: - Pemeliharaan mobil: 9 unit; - Pemeliharaan motor: 5 unit	Terpeliharanya: - Pemeliharaan mobil: 9 unit; - Pemeliharaan motor: 5 unit	73,68%	

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4.01 . 4.01.05 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya - Mesin Tik: 7 Unit; - Service AC: 13 Unit; - Komputer : 25 Unit; - Printer: 16 Unit; - Handly Talky: 12 Unit	Terpeliharanya: - Mesin Tik: 7 Unit; - Service AC: 13 Unit; - Komputer : 17 Unit; - Printer: 12 Unit	Terpeliharanya: - Mesin Tik: 7 Unit; - Service AC: 13 Unit; - Komputer : 17 Unit; - Printer: 12 Unit; - Handly Talky: 6 Unit	Terpeliharanya: - Mesin Tik: 7 Unit; - Service AC: 13 Unit; - Komputer: 17 Unit; - Printer: 12 Unit; - Handly Talky: 6 Unit	100%	Terpeliharanya: - Mesin Tik: 7 Unit; - Service AC: 13 Unit; - Komputer: 17 Unit; - Printer: 12 Unit; - Handly Talky: 6 Unit	Terpeliharanya: - Mesin Tik: 7 Unit; - Service AC: 13 Unit; - Komputer: 17 Unit; - Printer: 12 Unit; - Handly Talky: 6 Unit	75,34%	
4.01 . 4.01.05 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal	60 Orang	0 Orang	10 Orang	0 Orang	0 %	0 Orang	0 Orang	0 %	

**Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2021  
 dan Pencapaian Renstra Perubahan Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Bekasi  
 (Rencana Strategis Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2021-2023)**

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	300%	-	100%	100%	100%	0%	100%	33,33%	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300%	-	100%	100%	100%	0%	100%	33,33%	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	1 Laporan	33,33%	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	300%	-	100%	100%	100%	0%	100%	33,33%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Premi BPJS	1.806 Orang/Bul an	-	602 Orang/Bulan	602 Orang/Bulan	100%	0	602 Orang/Bulan	33,33%	
		Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN	1.548 Orang/Bul an		516 Orang/Bulan	516 Orang/Bulan			516 Orang/Bulan		
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	1 Laporan	33,33%	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300%	-	100%	100%	100%	0%	100%	33,33%	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai	540 Stell	-	180 Stell	180 Stell	0%	0	180 Stell	33,33%	
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai	36 Orang	-	0 Oran	0 Oran	0%	0	0	0%	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	300%	-	100%	100%	100%	0%	100%	33,33%	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	19516 Unit	-	2972 Unit	2972 Unit	100%	0	2972 Unit	15,22%	

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	280000 Lembar	-	80000 Lembar	80000 Lembar	100%	0	80000 Lembar	28,57%	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	16000 Buku/exemplar	-	5000 Buku/exemplar	5000 Buku/exemplar	100%	0	5000 Buku/exemplar	31,25%	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/perjalanan dinas	497 Kali	-	80 Kali	80 Kali	100%	0	80 Kali	16,09%	
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata/dikelola	1250 Box	-	900 Box	900 Box	100%	0	900 Box	72%	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300%	-	100%	100%	100%	0%	100%	33,33%	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor	384 Orang/Bulan	-	120 orang/bulan	120 orang/bulan	100%	0	120 orang/bulan	37,5%	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	300%	-	100%	100%	100%	0%	100%	33,33%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	66 Jenis	-	22 Jenis	22 Jenis	100%	0	22 Jenis	33,33%	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	75 Unit	-	25 Unit	25 Unit	100%	0	25 Unit	33,33%	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50%	-	15%	15%	100%	0	15%	30%	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	100%	-	23,19%	23,19%	100%	0	23,19%	23,19%	

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Pembinaan Bela Negara	450 Orang	-	60 Orang	60 Orang	10%	0	60 Orang	13,33%	
		Terlaksananya Pembinaan Konsepsi Dasar Kebangsaan	1500 Orang		0 Orang	0 Orang			0 Orang		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	15%	-	5%	5%	100%	0	5%	33,33%	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah penyelenggaraan pendidikan politik	2840 Orang	-	0 Orang	0 Orang	0%	0	0 Orang	0%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah partai politik yang mendapat bantuan keuangan	24 Partai Politik	-	8 Partai Politik	8 Partai Politik	100%	0	8 Partai Politik	66,66%	
		Jumlah lembaga yang mendapat bantuan dana hibah	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga			1 Lembaga		
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Peserta Pembinaan Pendidikan Politik	2700 Orang	-	0 Orang	0 Orang	0%	0	0 Orang	0%	



Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah										
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	300%	-	100%	100%	100%	0	100%	33,33%	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertib administrasi di Kota Bekasi	20 Ormas	-	10 Ormas	10 Ormas	100%	0	100%	50%	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat Bantuan Dana Hibah	20 Ormas/LS M	-	5 Ormas/LSM	5 Ormas/LSM	100%	0	5 Ormas/LSM	25%	

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017	540 Orang	-	0 Orang	0 Orang	0%	0	0 Orang	0%	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	0,5%	-	0,17%	0,12%	98%	0	0,12%	24%	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi	45 Kegiatan	-	15 Kegiatan	10 Kegiatan	66,66%	0	10 Kegiatan	22,22%	

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional  Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Narkoba	3 Kali  450 Orang	-	0 Kali  0 Orang	0 Kali  0 Orang	0  0	0	0 Kali  0 Orang	0%  0%	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	300%	-	100%	91,32%	91,32%	0	91,32%	30,44%	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Bekasi	300%	-	100%	100%	100%	0	100%	33,33%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianya Data Laporan Hasil Informasi Monitoring	36 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	0	12 Dokumen	33,33%	

(Sumber : Renstra Perubahan Bakesbangpol Tahun 2021-2023 dan Rencana Kerja Badan Kesbangpol 2021)

Berdasarkan penjelasan tabel di atas Badan Kesbangpol telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja program dan kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol adalah dengan melakukan rasionalisasi anggaran badan. Melalui rasionalisasi tersebut Badan Kesbangpol dapat membantu pemerintah Kota Bekasi di dalam melakukan penghematan tanpa melakukan pengurangan standar kinerja badan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi**

Keberhasilan penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat melalui sinergi perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat nasional dengan perencanaan yang berada di level daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah melakukan penyesuaian pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Seluruh dasar hukum pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengacu/mengadopsi dasar hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Saat ini, produk layanan yang diberikan Badan Kesbangpol Kota Bekasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Tanda Laporan Keberadaan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang berdomisili di Kota Bekasi. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) merupakan produk hukum Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang diadopsi dari UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Penerbitan SKT ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah kepada Panitia Pendirian Rumah Ibadah. Surat pertimbangan ini merupakan produk hukum yang disadur dari Peraturan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri serta peraturan-peraturan tentang kerukunan umat beragama. Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- 3) Pelaksanaan giat kerukunan umat beragama melalui kegiatan seminar, sosialisasi dan Focus Group Discussion pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

- 4) Pelaksanaan Pendidikan Politik untuk masyarakat pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik dan anggota Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bidang Politik Dalam Negeri;
- 5) Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk masyarakat pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik dan anggota Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bidang Kesatuan Bangsa;
- 6) Pelaksanaan verifikasi bantuan hibah kepada Forum/Organisasi bentukan pemerintah dan Orkemas untuk mendapatkan rekomendasi bantuan hibah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Subbid Kemasyarakatan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi bantuan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sub Bidang Fasilitiasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik;
- 8) Pelaksanaan kegiatan deteksi dini yang bertujuan untuk memantau perkembangan kantrantibmas dan kerawanan sosial-politik di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- 9) Pelaksanaan Tim Kewaspadaan Dini Daerah (Timwasdin). Kegiatan ini dilaksanakan pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Selain itu, pelayanan Badan Kesbangpol kepada masyarakat juga dilakukan ke dalam bentuk pelaksanaan belanja urusan. Belanja urusan ini berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi yang dilaksanakan pada Badan Kesbangpol. Pada Tahun 2021 belanja urusan Badan Kesbangpol sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi di dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi Badan dalam melaksanakan kegiatan urusan antara lain:

- 1) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol;
- 2) Jumlah SDM Badan Kesbangpol yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;

- 3) Masih adanya misedlink capaian yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap capaian yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2020  
(Rencana Strategis 2018-2020)**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
1	Nilai AKIP Kesbangpol (Hasil Evaluasi SAKIP PD dari Inspektorat)	-	-	Cc	Cc	B	B	B	Bb	Bb	-	-	-	
2	Persentase Kasus Perselisihan Antar Umat Beragama yang Diselesaikan - Rumus : $\frac{\text{Jumlah laporan kasus yang ditangani}}{\text{Jumlah laporan kasus}} = x100$	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
3	Persentase Kasus Perselisihan Suku Bangsa, Ras dan Antar Golongan yang Diselesaikan - Rumus : $\frac{\text{Jumlah laporan kasus yang ditangani}}{\text{Jumlah laporan kasus}} = x100$	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	

(Sumber : Dokumen Rencana Strategis Bakesbangpol Tahun 2018-2023 dan IKU Bakesbangpol)



**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2021**  
**(Rencana Strategis Perubahan Bakesbangpol Tahun 2021-2023)**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
1	Nilai AKIP Kesbangpol (Hasil Evaluasi SAKIP PD dari Inspektorat)	-	-	-	-	Bb	Bb	Bb	-	-	Bb	Bb	Bb	Penyesuaian indikator pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Bakesbangpol Tahun 2021-2023
2	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan - Rumus : $\frac{\text{Jml. konflik SARA yang diselesaikan (n)}}{\text{Jml. konflik SARA yang dilaporkan (n)}} \times 100$	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100	100%	100%	
3.	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik - Rumus : $= \frac{\text{Jumlah pembinaan politik oleh Badan Kesbangpol (n)}}{\text{Jumlah total Pembinaan Politik (n)}} \times 100\%$	-	-	-	-	54,37%	58,56%	88,56%	-	-	54,37%	58,56%	88,56%	
4.	Persentase Ormas yang Berpreran Aktif dalam Pembangunan Daerah - Rumus : $= \frac{\text{Jml. Ormas Tertib Administrasi (n)}}{\text{Jml. Total Ormas Tercatat di Kesbangpol Kota Bekasi}} \times 100\%$	-	-	-	-	64,2%	77,1%	90%	-	-	64,2%	77,1%	90%	

(Sumber : Rencana Strategis Perubahan Bakesbangpol Tahun 2021-2023 dan IKU Bakesbangpol)

### 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi merupakan lembaga teknis daerah Kota Bekasi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesbangpol mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kesbangpol menghadapi berbagai isu/permasalahan sosial di masyarakat. Isu-isu di dalam penyelenggaraan tugas yang dihadapi Badan Kesbangpol, antara lain:

#### 1) Isu Kerukunan Umat Beragama

Terdapat beberapa permasalahan di dalam penanganan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Rumusan isu kerukunan umat beragama, antara lain:

- **Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata-cara pendirian rumah ibadah di Kota Bekasi.**

Kota Bekasi termasuk ke dalam Kota Multikultural yang terdiri dari banyaknya perbedaan unsur yang ada di dalam masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama atau aliran kepercayaan. Kondisi ini menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah yang rawan konflik, terutama konflik agama. Salah satu permasalahan konflik terjadi karena kurangnya pemahaman tata cara pendirian rumah ibadah yang diatur melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat serta Peraturan Walikota Bekasi Nomor 47 Tahun 2013. Adapun data

rumah ibadah di Kota Bekasi sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Data Rumah Ibadah di Kota Bekasi**

NO	NAMA RUMAH IBADAH	JUMLAH	KET
1	Masjid	1147	
2	Musholla	1741	
3	Gereja Prostestan	82	
4	Gereja Katholik	8	
5	Vihara	11	
6	Pura	1	
7	Prajapati	1	
8	Klenteng	1	
9	Pasewakan	3	

(Sumber : Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat)

Dari data rumah ibadah tersebut di atas, Kota Bekasi memiliki komposisi penduduk yang beragam, hal ini tentunya bisa menimbulkan konflik berupa gesekan antar pemeluk Agama. Banyak konflik antar umat beragama di Kota Bekasi di latar belakang oleh permasalahan pembangunan rumah ibadah. Salah satu faktor yang mengakibatkan adanya konflik pembangunan rumah ibadah adalah karena belum mengetahuinya masyarakat perihal regulasi yang mengatur dalam pembangunan rumah ibadah. Berikut beberapa kasus konflik agama yang terjadi di Kota Bekasi, diantaranya :

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Permasalahan Keagamaan di Kota Bekasi**

NO	NAMA RUMAH IBADAH	TAHUN TERJADINYA KONFLIK	PERMASALAHAN KONFLIK
1	Gereja Galilea	Februari 2010	Penolakan warga masyarakat dan ormas islam terhadap pembangunan Gereja Galilea di Kelurahan Jakasetia, Bekasi Selatan
2	Gereja Huria Batak Protestan	Agustus 2010	Bentrok antar Ormas Islam dengan jemaat Gereja Huria Batak Protestan di Pondok Indah Timur
3	Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI), Gereja	Mei 2012	Penyegelan rumah ibadah yang berada di Kampung Mangseng, Kelurahan Perwira, Bekasi Utara karena tidak

NO	NAMA RUMAH IBADAH	TAHUN TERJADINYA KONFLIK	PERMASALAHAN KONFLIK
	Pantekosta, dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)		pernah mengajukan izin sesuai dengan prosedur kepada pemerintah daerah
4	Masjid Ahmadiyah	Februari 2013	Penutupan tempat ibadah Islam Ahmadiyah, Masjid Ahmadiyah di Jalan Terusan Pangrango Nomor 44, Jatibenting Baru, Pondok Gede Bekasi
5	Gereja St. Stanislaus Kosta	Maret 2014	Penolakan warga masyarakat dengan melakukan aksi pengepungan Gereja St. Stanislaus Kosta oleh Forum Umat Islam (FUI) dan Front Pembela Islam (FPI) untuk menuntut penghentian terhadap pembangunan di kalamiring, Jatisampurna Bekasi.
6	Gereja Santa Clara	Agustus 2015	Pelanggaran perizinan rumah ibadah Gereja Santa Clara yang beralamt di Kecamatan Bekasi Utara.
		Maret 2016	Penolakan warga masyarakat dari berbagai ormas islam dengan melakukan aksi unjuk rasa menolak pembangunan Gereja Santa Clara.

(Sumber : Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan)

Sampai saat ini Bakesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam fasilitasi segala bentuk permasalahan konflik keagamaan giat melakukan langkah-langkah strategis dalam manajemen dan resolusi konflik antar umat beragama yang terjadi melalui 2 cara yaitu pencegahan dan penyelesaian. Cara pencegahan adalah dengan membentuk dan memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai lembaga yang akan membantu pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat bergama di masyarakat, sedangkan cara penyelesaiannya yaitu melakukan pendekatan persuasif diantara kedua belah pihak yang beselisih menggunakan cara mediasi untuk menghentikan konflik yang berlangsung dan melakukan akomodasi bagi pihak-pihak yang sedang bertikai. Badan Kesbangpol juga memberikan kesempatan kepada 2 (dua) pihak yang berselisih untuk beraudensi dengan unsur muspida. Upaya lain yang dilakukan Badan Kesbangpol

dengan melakukan sosialisasi Peraturan Tata-Cara Pendirian Rumah Ibadah secara masif. Badan Kesbangpol juga melakukan verifikasi dan survei terkait berkas pengajuan pendirian rumah ibadah. Data empiris lapangan menunjukkan bahwa kontestasi antar kelompok agama yang berbeda-beda (heterogen) di Kota Bekasi dapat memicu terjadinya konflik dan di sisi lain dapat menjadi akomodasi atau kerjasama membangun perdamaian di atas segala perbedaan yang ada. Perdamaian dalam relasi antar kelompok beragama terbentuk karena kesadaran elit dan masyarakat berbagai agama untuk hidup berdampingan dan bekerjasama. Kesadaran dan sikap tersebut dipengaruhi faktor inklusivitas dalam beragama dan nilai-nilai budaya yang mampu menghidupi toleransi antar kelompok agama yang berbeda. Kontestasi antar kelompok agama berbeda sebagaimana yang terjadi di Kota Bekasi meskipun telah bisa diredam. Namun, hal itu bisa muncul kembali sewaktu-waktu di masa datang jika tidak diantisipasi lebih dini. Maka sangat diperlukan ruang-ruang komunikasi dan interaksi antar umat beragama yang berbeda untuk menjembatani jika ada perbedaan kepentingan dan juga munculnya isu yang bisa memecah integrasi keduanya. Dengan demikian, dialog-dialog antar lintas agama dan berbagai aliran dan pemahaman dalam internal agama itu sendiri perlu lebih diintensifkan kembali. Hal ini untuk mengantisipasi gejolak konflik yang bisa muncul kapan saja. Menghidupkan kembali forum-forum di masyarakat yang menjembatani dialog antar kelompok berbeda sangat memberikan efek positif dengan dilakukan hal tersebut berimplikasi menyebarkan pemahaman saling menghormati dan menerima perbedaan agama demi menciptakan dan melanggengkan hubungan harmonis antar umat beragama khususnya yang berada di Kota Bekasi. setiap agama memiliki dasar pokok yang mendorong terwujudnya hidup toleransi dan membina kerukunan di antara intern dan antar umat beragama. Hal ini dapat direalisasikan apabila konsep toleransi dan kerukunan tersebut dilakukan oleh para tokoh agama maupun pemeluk masing-masing agama yang dikuatkan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung terciptanya kerukunan hidup bersama tersebut. Selain itu, etika juga menjadi salah satu

instrumen penting untuk menumbuhkan kehidupan yang penuh kebajikan, termasuk kehidupan yang penuh toleran antar penganut agama.

- **Berkembangnya Paham Radikal Keagamaan.**

Pada tahun 2021, Kasus lain yang muncul ke permukaan adalah berkembangnya pemahaman radikal dalam beragama. Pemahaman ini berkembang menjadi sebuah gerakan-gerakan yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol bersama stakeholder tetap mewaspadaai penyebaran paham Radikal di masyarakat, terlebih dengan kembalinya para combatan dari medan Jihad di Suriah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelejen Nasional, diperkirakan jumlah combatan yang kembali dari medan Jihad hampir 200 orang. Sebagian besar dari combatan tersebut berdomisili di wilayah Jabodetabek.

Terkait hal tersebut, Badan Kesbangpol bersama unsur terkait giat melakukan pendekatan dan penggalangan. Badan Kesbangpol bersama Kominda Kota Bekasi juga melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap kemungkinan penyebaran paham radikal yang berkembang di masyarakat. Selain itu, Badan Kesbangpol Kota Bekasi bersama MUI, Kantor Kemenag, FKUB dan FPK terus melakukan pendampingan kepada pengurus DKM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam hal pencegahan paham radikal di wilayah.

Upaya lain yang dilakukan Badan Kesbangpol adalah melakukan tindakan preventif. Upaya preventif yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah dengan mengadakan dialog mendalam diantara pemuka agama. Badan Kesbangpol juga memperkuat peran dan fungsi dari forum bentukan pemerintah yang memiliki hubungan kerja di dalam kerukunan umat beragama, dalam hal ini FKUB dan FPK. Secara umum, kasus kerukunan umat beragama yang terjadi di Kota Bekasi disebabkan karena faktor pendirian rumah ibadah, penistaan ajaran agama dari kelompok tertentu dan perselisihan yang terjadi di internal pengurus rumah ibadah.

## 2) Isu Keamanan dan Ketertiban

Masalah-masalah sosial yang muncul di Kota Bekasi disebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampaknya, kaum urban yang menjadi pengangguran menjadi beban ekonomi dan beban sosial yang berat bagi masyarakat dan pemerintah. Besarnya pengangguran akan meningkatkan kerawanan sosial di Kota Bekasi. Rumusan isu keamanan dan ketertiban antara lain:

**TABEL 2.7**

### Rekapitulas Permasalahan Kerawanan Sosial di Kota Bekasi Tahun 2021

No.	Wilayah Titik Rawan	Permasalahan
1	2	3
1.	Kecamatan Bekasi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penataan lahan parkir dan pkl sehingga sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu;</li> <li>• Permasalahan penyakit masyarakat (prostitusi dibalut dengan kegiatan kafe).</li> </ul>
2.	Kecamatan Bekasi Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendirian rumah ibadah (Gereja) Santa Clara terdapat penolakan dari beberapa kelompok masyarakat. Penolakan dimotori oleh Ponpes An-Nur dan Ponpes At-Taqwa;</li> <li>• Perkembangan faham radikal di Masjid Al-Hikmah Duren Jaya.</li> </ul>
3.	Kecamatan Bekasi Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan penataan PKL di Jalan M. Yamin;</li> <li>• Ditemukannya tempat transit teroris;</li> <li>• Maraknya aktifitas Organisasi Masyarakat di luar koridor hukum.</li> </ul>
4.	Kecamatan Bekasi Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terindikasi aktifitas aliran syiah di pemukiman warga;</li> <li>• Aksi penolakan masyarakat terhadap pengembang Kota Bintang terkait data administrasi perijinan</li> <li>• Penertiban dan pembongkaran PKL;</li> <li>• Penolakan Ormas terhadap penertiban lahan kosong</li> </ul>
5.	Kecamatan Medan Satria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monopoli lahan parkir pasar family yang dilakukan oleh oknum Ormas;</li> <li>• Ditemukannya tempat transit terduga teroris.</li> </ul>
6.	Kecamatan Rawalumbu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terindikasi aktifitas aliran syiah di pemukiman warga;</li> <li>• Permasalahan izin rumah ibadah HKBP Rawalumbu;</li> <li>• Perselisihan/Bentrok Kelompok Ormas (Ormas Pemuda Batak Bersatu dengan Gerakan Muslim Pembela Aqidah) yang melatarbelakangi kesalahpahaman antar anggota ormas yang berada di TKP (Utang piutang).</li> </ul>
7.	Kecamatan Jatiasih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan peredaran narkoba (ditemukan tempat transit ganja);</li> <li>• Ditemukan lokasi home industri narkoba jenis sabu.</li> <li>• Konflik hak administrasi ahli waris tanah Hankam Jatikarya kepada pihak Jasa Marga</li> </ul>

No.	Wilayah Titik Rawan	Permasalahan
1	2	3
8.	Kecamatan Pondok Gede	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Masjid Al-Misbah Pondok Gede;</li> <li>• Permasalahan PKL di pasar Pondok Gede.</li> </ul>
9.	Kecamatan Jatisampurna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perselisihan/Bentrok Kelompok Ormas yang melatarbelakngi egosentrisme dengan penduduk setempat;</li> <li>• Penolakan warga terhadap jalan tol di jati karya;</li> <li>• Permasalahan kafe remang-remang.</li> </ul>
10	Kecamatan Pondok Melati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditemukan tenaga kerja asing illegal di rumah pendidikan.</li> </ul>
11.	Kecamatan Bantargebang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Permasalahan ini melibatkan masyarakat di sekitar tempat pengelolaan sampah bantar gebang.</li> </ul>
12.	Kecamatan Mustika Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditemukan tempat transit teroris.</li> <li>• Permasalahan penetiban PKL di Mustikajaya.</li> </ul>

(Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik)

Untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol memaksimalkan pemantauan wilayah terkait deteksi dini terhadap sumbu-sumbu yang dapat memicu kerawanan sosial di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol melakukan giat deteksi dini dan pendidikan Intelegen Daerah kepada pengurus forum bentukan pemerintah di bidang kewaspadaan serta jaring intelegen di tingkat Kelurahan.

Oleh karenanya, penguatan fungsi dan peran dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) menjadi penting. Keberadaan Kominda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kota Bekasi diharapkan dapat atau mampu mencari, mengumpulkan dan menganalisa informasi di lingkungan/wilayah kerja masing-masing dalam menunjang stabilitas keamanan dan menekan tingkat kerawanan sosial di Kota Bekasi. Diharapkan pula tanggungjawab aparat kelurahan, kecamatan dan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sebagai jaring Deteksi Dini.

Berdasarkan analisa dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan skala prioritas (pembobotan) Badan Kesbangpol dapat ditekankan kepada :

#### 1) **Program**

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya memiliki posisi



penting dalam menyelesaikan isu-isu kritis urusan kesatuan bangsa dan politik. Ketiga program tersebut menjadi wadah untuk kegiatan-kegiatan yang terfokus kepada pembangunan wawasan kebangsaan, pencegahan dan penanganan konflik serta menjaga kerukunan masyarakat di Kota Bekasi.

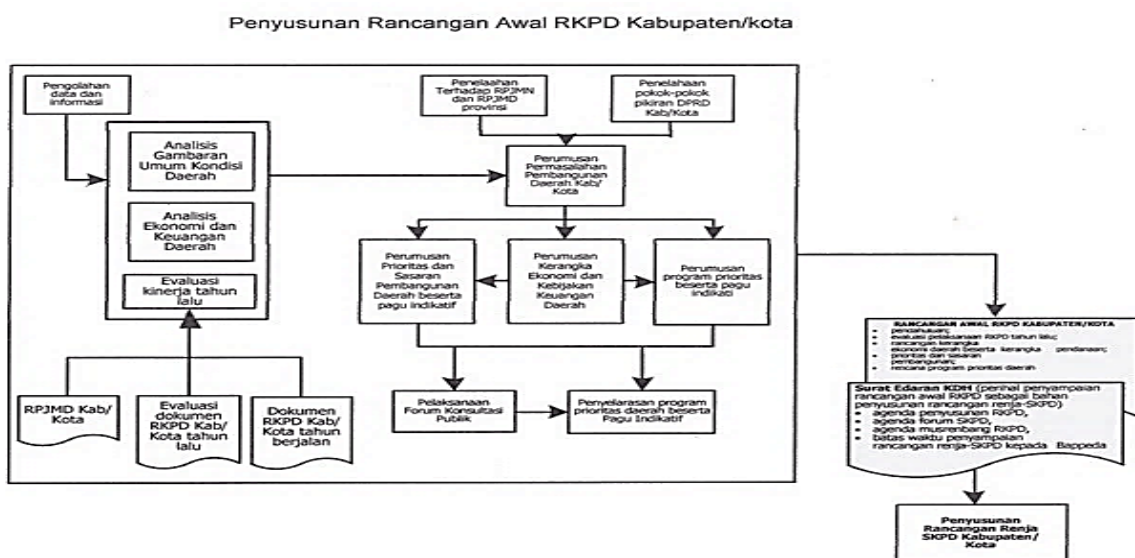
2) **Kegiatan**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Kegiatan Penanganan Konflik Sosial dan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya termasuk ke dalam skala prioritas Badan Kesbangpol untuk menyelesaikan isu-isu strategis seperti yang telah dijelaskan di atas.

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk perencanaan yang baik. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Berikut kami sampaikan rancangan awal RKPD terkait usulan program dan kegiatan Badan Kesbangpol hasil penyesuaian dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Gambar 2.1 Alur Rancangan Awal RKPD dan Renja PD**



**Tabel 2.8**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	SKPD	1. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	10,956,646,330	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	SKPD	1. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	10,276,301,740	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,000,000	Pengurangann pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk renja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	100%	9,100,250,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	100%	9,093,250,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602 Orang	9.090.250.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602 Orang	9.090.250.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	10,000,000	-	-	-	-	0	Sub kegiatan di tiadakan sesuai dengan hasil desk renja
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	3,000,000	Penambahan sub kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan OPD dan hasil usulan desk renja renja
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	360,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	30,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	20,000,000	Pengurangan pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk renja
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	100,000,000	-	-	-	-	0	Sub kegiatan di tiadakan sesuai dengan hasil desk renja
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	55 Orang	230,000,000	-	-	-	-	0	Sub kegiatan di tiadakan sesuai dengan hasil desk renja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perundang-Undangan		Peraturan Perundang-Undangan								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	650,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	330,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	340,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	170,000,000	Pengurangan pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk renja
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20,000,000	Pengurangan pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk renja
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100,000,000	Pengurangan pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk renja
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Pengurangan pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk renja
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	551.396.330	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	550,051,740	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	551,396,330	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	550,051,740	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	SKPD	Persentase Pemeliharaan Barang	100%	290,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	SKPD	Persentase Pemeliharaan Barang	100%	280,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	250,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	250,000,000	- Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara berjumlah 9 Unit - Jumlah motor yang terpelihara 13 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	40,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	30,000,000	Pengurangan pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk renja
II	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50%	1,450,000,000	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50%	1,320,768,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	100%	1,450,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	100%	1,320,768,000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	650 Orang	1,450,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	650 Orang	1,320,768,000	Pengurangan pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk renja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	Kota Bekasi	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	5 %	<b>24,068,321,000</b>	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	Kota Bekasi	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	5 %	<b>3,549,357,000</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Bekasi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan politik	4 Kegiatan	24,068,321,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Bekasi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan politik	4 Kegiatan	3,549,357,000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	11 Dokumen	22,268,321,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	9 Dokumen	2,268,321,000	Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi bantuan Keuangan Partai Politik Kota Bekasi, Hibah ke KPUD Kota Bekasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3460 Orang	2,150,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2260 Orang	1,246,880,000	Pengurangan pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk renja
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	250,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	12 Laporan	34,156,000	Pengurangan pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk renja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Politik di Daerah					Politik di Daerah		Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
IV	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Kota Bekasi	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	100 %	11,464,392,700	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Kota Bekasi	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	100 %	8,955,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertib administrasi di Kota Bekasi	17 Ormas/ LSM	11,464,392,700	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertib administrasi di Kota Bekasi	24 Ormas/ LSM	8,955,000,000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	17 Dokumen	11,164,392,700	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	24 Dokumen	8,655,000,000	Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi Hibah ke Ormas/LSM
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 peserta	300,000,000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 peserta	300,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	Kota Bekasi	Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	0,18 %	800,000,000	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	Kota Bekasi	Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	0,18 %	800,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Bekasi	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi	15 Kegiatan	800,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Bekasi	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi	15 Kegiatan	800,000,000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1250 Orang	800,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1250 Orang	800,000,000	
VI	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	Kota Bekasi	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	100 %	1,500,000,000	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	Kota Bekasi	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	100 %	1,495,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Persentase Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Bekasi	100 %	1,500,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Persentase Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Bekasi	100 %	1,495,200,000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	328 Orang	850,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	265 Orang	845,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	650,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	650,000,000	

(Sumber : Rencana Strategis Perubahan Bakesbangpol Tahun 2021-2023)

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam melakukan perumusan rencana program/kegiatan, Badan Kesbangpol selalu melibatkan stakeholder di dalam merumuskan perencanaan. Dari stakeholder tersebut akan terkumpul masukan dan aspirasi terkait perencanaan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam menjangkau aspirasi tersebut, Badan Kesbangpol memulai dari tahapan Musrenbang tingkat Kecamatan, kemudian melalui Forum SKPD, dan diakhiri dalam Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi.

Dari forum-forum penjangkauan aspirasi/masukan tersebut, terdapat usulan dari masyarakat terkait pelaksanaan program/kegiatan SKPD. Usulan tersebut adalah :

**Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Bekasi**

**SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Murni)	Besaran/Volume (Perubahan)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat, Kota Bekasi	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2,211,580,860	2,611,580,860	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat, Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	2,211,580,860	2,611,580,860	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jawa Barat, Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2,211,580,860	2,611,580,860	- Pembinaan Konsepsi Dasar Kebangsaan - Pemantapan Ideologi Bangsa dan Nilai-Nilai Pancasila - Pembinaan Bela Negara bagi pelajar dan guru - Pembinaan Pasukan Pengawal Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) - Usulan pada Anggaran Perubahan yaitu kegiatan Kemah Kebangsaan bagi Ormas/LSM
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kota Bekasi	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	3,549,357,000	61,148,826,000	Hibah KPUD Kota Bekasi (Dana Cadangan pelaksanaan Pemilu di Tahun 2024) : Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rkpd) Mengusulkan Perubahan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 23,268,241,000,- Namun Setelah Diajukan Terdapat Koreksi Dari Evaluasi Gubernur Sesuai Dengan Dasar Ketentuan Dari Surat Edaran Nomor 900. 1.9. 1 /435/Sj Tentang

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume (Murni)	Besaran/ Volume (Perubahan)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
						Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Anggaran yang disesuaikan menjadi Rp. 59.867.790.000,-
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Bekasi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan politik	3,549,357,00 0	61,148,826,00 0	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2,268,321,00 0	61,148,826,00 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan Keuangan ke Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi sejumlah 8 Parpol (Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi terkait dengan kenaikan jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Bekasi Nomor 218/Kep.112-Kesbangpol/III/2023)</li> <li>- Hibah KPUD Kota Bekasi Tahun 2023 (Hibah Non Pemilihan)</li> <li>- Hibah KPUD Kota Bekasi (Dana Cadangan pelaksanaan Pemilu di Tahun 2024)</li> <li>- Pengadaan alat Handy Talkie (HT) dalam rangka menunjang pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024</li> </ul>
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,246,880,00 0	1,246,880,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Pendidikan Politik bagi pemilih pemula dan Masyarakat</li> <li>- Pembinaan Manjaemen Partai Politik</li> <li>- Sosialisasi Pileg dan Pilpres persiapan pemilu 2024</li> </ul>
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	34,156,000	34,156,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan Evaluasi situasi kondisi politik daerah</li> </ul>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Murni)	Besaran/Volume (Perubahan)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Bekasi	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	8,955,000,000	8,955,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertib administrasi di Kota Bekasi	8,955,000,000	8,955,000,000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8,655,000,000	8,955,000,000	- Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebanyak 4 Lembaga (MUI, FKUB, FPK, FKDM) - Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebanyak 24 Ormas/LSM dan pada anggaran perubahan terdapat perubahan menjadi 26 Ormas/LSM
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300,000,000	300,000,000	- Sosialisasi undang - undang nomor 16 tahun 2017 dan permendagri nomor 59 tahun 2019 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Bekasi	Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	800,000,000	800,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Bekasi	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan	800,000,000	800,000,000	

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume (Murni)	Besaran/ Volume (Perubahan)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
			Budaya di Kota Bekasi			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800,000,000	800,000,000	- Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) - Roadshow sinergitas tokoh agama, Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Daerah
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	1,495,200,000	1,495,200,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Jumlah Monitoring Kewaspadaan Dini Daerah dan Pemantauan Orang Asing di Kota Bekasi	1,495,200,000	1,495,200,000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	845,200,000	845,200,000	- Pembinaan FKDM - Sosialisasi Orang Asing
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	650,000,000	650,000,000	- Fasilitasi Tim kewaspadaan Dini Daerah

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 merupakan rencana pembangunan jangka menengah keempat dari 4 (empat) tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Ke-4 tahun 2020-2025 adalah kelanjutan RPJMN ketiga Tahun 2014-2019, dengan arah/isu utama sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025, yaitu: “Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dimaksud, Pemerintah telah merumuskan Visi yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 3 (tiga) Misi yang diemban, yaitu:

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan
3. Memperkuat demokrasi keadilan di semua bidang.

Untuk melaksanakan 3 (tiga) misi di atas, Pemerintah Pusat menetapkan agenda untuk mendukung misi tersebut. Agenda tersebut antara lain:

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Agenda I   | : | Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; |
| Agenda II  | : | Perbaikan tata kelola pemerintahan;                       |
| Agenda III | : | Penegakan pilar demokrasi;                                |
| Agenda IV  | : | Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi;                |
| Agenda V   | : | Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.                |

Dari kelima agenda tersebut, pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terfokus pada penegakan pilar demokrasi. Penegakan pilar demokrasi bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. Hal ini tertuang di dalam Renstra Kemendagri 2020-2024.

Dalam pelaksanaannya, penegakan pilar demokrasi difokuskan kepada:



1. Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik, khususnya revisi terbatas terhadap UU Nomor 15 Tahun 2011 pengganti UU Nomor 22 Tahun 2007 menjadi tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi;
3. Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil;
4. Indeks Kebebasan Sipil;
5. Indeks Hak-Hak Politik;
6. Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pemda dan para pemangku kepentingan;
7. Persentase forum dialog publik yang efektif; serta
8. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI).

Kebijakan yang telah digariskan Menteri Dalam Negeri RI melalui Renstra Kemendagri tersebut kemudian dijabarkan lebih teknis oleh Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karenanya, untuk melihat arah kebijakan nasional pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melakukan telaahan kebijakan Direktorat Jenderal Kesbangpol Kemendagri RI dan kebijakan Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat. Telaahan bermaksud untuk melakukan analisa kemampuan Badan Kesbangpol Kota Bekasi di dalam menjawab tantangan isu di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkembang di tataran pusat maupun provinsi. Telaahan ini juga disertai analisa faktor penghambat dan pendorong pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi dihubungkan dengan kebijakan prioritas yang dikeluarkan Ditjen Kesbangpol dan Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat. Telaahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dalam Pelayanan**

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat</b>			
	1) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	• Data base keberadaan/domisili organisasi kemasyarakatan di Kota Bekasi belum	• Anggota organisasi kemasyarakatan kurang disiplin di dalam mengikuti kegiatan	• Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk meningkatkan kapasitas organisasi

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
		terkonsolidasi dengan baik; • Anggota-anggota organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan tidak melakukan transfer pengetahuan kepada anggotanya	peningkatan kapasitas	kemasyarakatan yang ada di Kota Bekasi.
<b>Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Politik Dalam Negeri</b>				
	2) Persentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu	Kurangnya pendidikan dasar bagi aparatur Kesbangpol terkait metode penyusunan laporan pemantauan perkembangan politik yang sedang berkembang	• Kurangnya penjelasan mengenai indikator-indikator politik yang harus dilaporkan dari objek pantauan	• Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk memberikan laporan pantauan terkait perkembangan politik yang terjadi di Kota Bekasi
	3) Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Partai Politik terkait informasi tata cara pemberian Bantuan Keuangan	• Keterlambatan Partai Politik di dalam menyelesaikan SPJ Bantuan Keuangan	• Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang berhak menerima Bantuan Keuangan
<b>Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Kewaspadaan Nasional</b>				
	4) Jumlah Pemantauan Situasi Daerah	Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam melakukan pemantauan situasi daerah.	• Kurangnya sarana dan prasarana serta aparatur di dalam menunjang kegiatan pemantauan	• Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan pemantauan terkait situasi dan eskalasi yang terjadi di daerah
	5) Jumlah aparatur Pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan bidang Kewaspadaan Nasional	Minimnya aparatur Kesbangpol Kota Bekasi yang mendapatkan Diklat mengenai Kewaspadaan Nasional	• Kurangnya anggaran yang mendukung adanya Diklat Kewaspadaan Nasional	• Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan pembinaan kepada aparatur terkait Kewaspadaan Nasional
<b>Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</b>				
	1) Jumlah kerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam rangka peningkatan	Belum tersedianya ketentuan/ metode baku terkait materi dan pola kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan	• Rendahnya keinginan masyarakat di dalam mengkaji wawasan kebangsaan dan	• Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjalin kerjasama yang

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
	kapasitas masyarakat di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Organisasi Kemasyarakatan dalam membangun wawasan kebangsaan di masyarakat	ideologi Negara, terutama dari kalangan pemula	intensif dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka membangun ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat
	2) Jumlah penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah	Belum tersedianya materi/ bahan ajar baku yang membahas nilai-nilai kebangsaan bagi pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya keinginan pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah di dalam mengkaji nilai-nilai kebangsaan demi terciptanya wawasan kebangsaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur pemerintahan</li> </ul>
2	<b>Indikator Kinerja Bakesbangpol Prov. Jawa Barat: Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat</b>			
	Sasaran Jangka Menengah: 3) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu;	Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesbangpol Kota Bekasi tidak memiliki payung hukum untuk melakukan sosialisasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjamin ketertiban dan keamanan selama proses Pemilu</li> </ul>
	4) Tingkat Penyelenggaraan Pendidikan Politik;	Adanya perbedaan pemahaman dan cara pandang dari sebagian aktifis organisasi yang berada di Kota Bekasi di dalam melakukan pemaknaan proses politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data domisili dari organisasi kemasyarakatan atau perwakilan kelompok lainnya sering berubah tanpa ada pemberitahuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesbangpol Kota Bekasi, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk memperkuat kelembagaan demokrasi yang ada di Kota Bekasi serta meningkatkan pemahaman politik masyarakat Kota Bekasi</li> </ul>
	5) Tingkat Peran Serta Masyarakat Madani (Civil Society) dalam Pembangunan Politik;	Belum ada payung hukum yang secara terperinci mengatur keterlibatan masyarakat beserta batasannya di dalam Pembangunan Politik di Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat oknum dari Orkemas atau aktifis di Kota Bekasi yang menggunakan dalil peran serta masyarakat atau keterbukaan publik melakukan tindakan penyidikan yang bukan wewenang dari organisasi tersebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesbangpol Kota Bekasi, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk memperkuat keterlibatan masyarakat di dalam Pembangunan Politik di Kota Bekasi dengan cara menanamkan nilai-nilai politik yang santun dan beretika</li> </ul>

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
	6)Tingkat Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Pemerintah Pusat maupun Provinsi belum menyediakan modul/ garis-garis besar Wawasan Kebangsaan terkait kondisi Indonesia saat ini	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya keinginan dari masyarakat untuk memahami Wawasan Kebangsaan, terutama dari kalangan remaja/ pemula</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesbangpol Kota Bekasi, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai dan ideologi Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat, terutama kalangan masyarakat pemula/remaja</li> </ul>

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran dari Badan Kesbangpol dalam periode 2018-2023 harus disesuaikan dengan misi dan program prioritas yang dimaksud sesuai dengan rencana strategis perubahan. Adapun tujuan Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
2. Mewujudkan, kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi;

Adapun sasaran Sasaran adalah prediksi hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi adalah:

- 1) Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
- 2) Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat;
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi;
- 4) Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan.

Dari sasaran tersebut kemudian ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja tujuan.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Tahun 2018-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Bekasi**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Data Existing	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-		
						Tahun 2022 (n-1)	2023	
1	Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol		-	Bb	Bb	
				Nilai AKIP Kesbangpol	-	Bb	Bb	
2	Mewujudkan kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Indeks Toleransi			5.998	6.025	
				Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	-	100%	100%	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi		Persentase demokrasi masyarakat dalam pembangunan			12.04%	14.66%
				Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik	-	58.56%	88.56%	
				Persentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah	-	77.1%	90%	
	Meningkatkan peran serta ormas dalam pembangunan							

Sumber Data: Renja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2023

Sasaran-sasaran yang ada kemudian dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program anggaran/ kegiatan. Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih Badan Kesbangpol Kota Bekasi menyediakan beberapa program, yaitu:

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program ini diukur dengan menggunakan Persentase Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Persentase Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Persentase Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Persentase Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

**2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.**

Program ini diukur dengan menggunakan Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

**3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.** Program ini diukur dengan menggunakan Persentase Pembinaan Politik Daerah;

**4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.**

Program ini diukur dengan menggunakan Persentase jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina;

**5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.** Program ini diukur dengan menggunakan Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.**6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.** Program ini diukur dengan menggunakan Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan.**3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mewujudkan misi Walikota Bekasi yang ke 5 :

**Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman,** maka perlu dilakukan upaya untuk mencapai misi tersebut. Upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Penguatan fungsi kesatuan bangsa di masyarakat Kota Bekasi demi terciptanya keadaan tenggang rasa terhadap kearifan budaya dan sosial budaya yang multikultur;
- 2) Penguatan fungsi bela negara di masyarakat Kota Bekasi untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat di dalam menghadapi era globalisasi;
- 3) Penguatan fungsi wawasan kebangsaan di masyarakat Kota Bekasi demi mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi;
- 4) Penguatan fungsi kewaspadaan dini di masyarakat Kota Bekasi;
- 5) Penguatan fungsi pendidikan politik untuk masyarakat Kota Bekasi; dan
- 6) Penguatan fungsi pengawasan dan pencegahan terkait peredaran Narkoba di Kota Bekasi.

Misi pembangunan yang dicanangl

keterkaitan dengan tupoksi Badan Kesbar. \_\_

- 1) Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Misi ini memiliki tujuan untuk menciptakan Kota Bekasi sebagai kota yang memiliki tingkat stabilitas dan kondusifitas yang tinggi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan prioritas Kepala Daerah terpilih, Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan perencanaan program dan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD. Pada tahun 2023 ini Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan penguatan Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan serta penguatan fungsi deteksi dini agar tidak menyebabkan konflik SARA di masyarakat. Badan Kesbangpol juga melakukan pendidikan politik ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Bekasi serta memberikan pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan Kota Bekasi. Untuk menjaga kantrantibmas dan menekan angka kerawanan sosial di Kota Bekasi, Badan Kesbangpol bekerja sama dengan instansi terkait melakukan giat deteksi dini, kewaspadaan dini masyarakat dan pemantauan lingkungan secara rutin.

Untuk mendukung upaya yang telah disebutkan di atas, Badan Kesbangpol menyiapkan pembiayaan upaya tersebut dalam wujud rincian program dan kegiatan Badan Kesbangpol yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Rincian tersebut adalah penjelasan dari usulan pagu indikatif pada Anggaran sebagai berikut:

## **1. Belanja Langsung Non Urusan**

### **a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

#### **1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

##### **- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 laporan yang mencakup (Renstra, Proker, Renja, RKT, LKPJ dan LKIP). Hasil yang didapat adalah meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

## 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

### - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.894.620.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya Pembayaran gaji, tunjangan dan premi BPJS ASN.

### - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 18 laporan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya sistem pelaporan keuangan SKPD.

## 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

### - Pendidikan dan Pelatihan Formal

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal aparatur sebanyak 12 orang selama 12 bulan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya kapasitas dan sumber daya aparatur. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

## 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

### - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 170.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya layanan alat tulis kantor sebanyak 3 Paket. Hasil yang didapat adalah tersedianya layanan alat tulis kantor selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

### - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya layanan cetakan dan penggandaan sebanyak 2 Paket. Hasil yang didapat adalah tersedianya layanan cetakan dan penggandaan



selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 12 Dokumen. Hasil yang didapat adalah tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 Bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta makanan dan minuman Rapat sebanyak 12 Laporan. Hasil yang didapat adalah terlaksananya aktifitas kantor selama 12 Bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000 dengan keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah penataan arsip pada Badan Kesbangpol sebanyak 250 Dokumen. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

**5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

- ✓ Sub Kegiatan ini pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 550.051.740. dan pada RKPD Perubahan menjadi Rp. 548.777.613. Untuk keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk dengan target capaian sebanyak 12 Laporan. Hasil yang didapat adalah terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

**6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak (22 unit) 9 unit roda empat dan 13 unit roda dua. Hasil yang didapat adalah tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor sebanyak 25 Unit untuk 12 Bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

## 2. Belanja Langsung Urusan SKPD

### a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

#### 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila

#### 2) Ia dan Karakter Kebangsaan

- **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - ✓ Sub Kegiatan ini pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 2.211.580.860 dan target dari Sub Kegiatan ini yaitu 690 Orang dan pada RKPD Perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 2.611.580.860 dan perubahan target sub kegiatan menjadi 840 Orang. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
    - Pelaksanaan Pembinaan Bela Negara di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini yaitu pelajar SMA/SMK sederajat, perwakilan peserta terdiri dari beberapa pelajar yang ada di Kota Bekasi. Adapun model pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk membentuk sikap disiplin waktu, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan

menumbuhkan jiwa patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan taqwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa dan agama, menghilangkan sikap negative seperti malas, apatis, boros, egois dan tidak disiplin, membentuk perilaku jujur, tegas, adil dan kepedulian antar sesame.

- Pelaksana Konsepsi Dasar Kebangsaan yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi bimtek dengan sasaran peserta masyarakat Kota Bekasi. Adapun hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman kembali terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI serta meningkatkan kecintaan kepada Nusa dan Bangsa.
- Pelaksanaan Pemantapan ideologi bangsa dan nilai-nilai pancasila dengan sasaran peserta terdiri dari kalangan stakeholder terkait yaitu lembaga pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan amanah dari pusat mengenai pembentukan Tim Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kabupaten/Kota. Model pembinaan dengan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD). Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselesaikannya permasalahan wawasan kebangsaan di Kota Bekasi.
- Pelaksanaan Pembinaan forum pembauran kebangsaan dengan kelompok sasaran yang berasal dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bekasi, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah Permendagri Nomor 34 Tahun 2006, dan lembaga yang bernaung di Bakesbangpol, maka berkewajiban untuk memfasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam menjalankan fungsi dan roda kelembagaan FPK sesuai dengan pedoman peranan yang ada di dalam amanah Permendagri tersebut. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan Forum Kebangsaan Kebangsaan (FPK) sebagai pilar pemerintah dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai pancasila di masyarakat sehingga masyarakat Kota Bekasi yang sangat

heterogen ini dapat menjaga keharmonisan antar warga masyarakatnya.

- Pelaksanaan kemah kebangsaan bagi Organisasi Kemasyarakatan menjadi kegiatan yang diajukan pada RKPD Perubahan adapun pelaksanaan tersebut melibatkan Pengurus Ormas/LSM yang ada di Kota Bekasi yang turut serta berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang kegiatan. Adapun keluaran dilaksanakan kegiatan ini yaitu menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air melalui penanaman dan pengamalan ideologi nilai-nilai Pancasila dalam rangka menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

**1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**

- **Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun.

- ✓ Sub Kegiatan ini pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 2.268.321.000,- dan pada RKPD Perubahan berubah menjadi Rp. 21.987.205.000,- dan pada Evaluasi Gubernur berubah menjadi Rp. 61.148.826.000,- dengan target indikator semula 9 Dokumen menjadi 11 Dokumen. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan fasilitasi partai politik yang mendapat bantuan keuangan yang mendapat kursi di DPRD Kota Bekasi sejumlah 8 Partai Politik. Adapun hasil yang didapat adalah terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan bagi partai politik di Kota Bekasi. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi terkait dengan kenaikan jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Bekasi Nomor 218/Kep.112-Kesbangpol/III/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Periode 2019-2024 Tahun Anggaran 2023 maka Badan Kesbangpol menyesuaikan besaran pada RKPD Perubahan dalam memfasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Tahun Anggaran 2023.
- Pelaksanaan fasilitasi lembaga yang mendapat Bantuan Dana Hibah sebanyak 1 Lembaga yaitu KPUD Kota Bekasi (Biaya Operasional Tahun Anggaran 2023) dan tambahan pagu dana cadangan pemilu serentak tahun 2024 yang dianggarkan melalui RKPD Perubahan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini terfasilitasi operasional lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2024 dan berdasarkan kepada pengajuan dana operasional lembaga tersebut, Bakesbangpol hanya memfasilitasi dalam pengajuan Hibah berdasarkan hasil kebutuhan serta melalui tahapan verifikasi bersama-sama dengan Tim TAPD.
- **Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 2.260 Orang.

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.246.880.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
  - Pelaksanaan pembinaan Manajemen Partai Politik. Adapun Hasil yang didapat adalah tertib administrasi dalam pertanggungjawaban bantuan keuangan dan hibah bagi partai politik di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah pengurus parpol yang mendapat Bantuan Keuangan.
  - Pelaksanaan pembinaan pendidikan politik di Kota Bekasi. Kegiatan ini direncanakan tersebar se-Kota Bekasi dengan pelaksanaan pendidikan politik secara on the spot di sekolah-sekolah. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa SMA/SMK sederajat.
  - Pelaksanan pembinaan pendidikan politik dalam bentuk sosialisasi pileg dan pilpres. Kegiatan ini direncanakan tersebar se-Kota Bekasi dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder perangkat daerah terkait dalam rangka penguatan fungsi penyelenggaraan pemilu. Sasaran dari kegiatan ini adalah Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, dan Instansi Pemerintah lainnya.
- **Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 12 Laporan.
- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 34.156.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pemantauan situasi politik di daerah sebagai bentuk tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan maksud dan tujuan menjaga kondusifitas pra

pemilu dan pilkada pada 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi.

**c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

**1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

- **Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp 8.655.000.000, dan pada RKPD Perubahan pagu anggaran naik menjadi Rp. 9.255.000.000. Adapun hasil yang didapat adalah terfasilitasinya hibah untuk Ormas/LSM yang semula sebanyak 24 Ormas/LSM berubah menjadi 26 Ormas/LSM. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini berupa terfasilitasinya Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat Bantuan Dana Hibah di Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 300 Orang.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 300.000.000. Dilihat dari jumlah Organisasi Kemasyarakatan/LSM yang begitu kompleks dari berbagai bidang kegiatan sudah kewajiban pemerintah daerah melalui Bakesbangpol memfasilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil yang didapat adalah terciptanya Tertib Administrasi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi.

**d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

**1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

- **Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu pada APBD Murni 1.250 Orang menjadi 1.350 Orang pada RKPD Perubahan.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 800.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan fasilitasi pencegahan narkoba sebanyak 2 kali. Kegiatan pertama dengan melaksanakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) bekerja sama dengan unsur stakeholder terkait yang ada di setiap wilayah, dan pelaksanaan kedua dengan memberikan Pembinaan Sosialisasi Bahaya Narkoba (P4GN) kepada masyarakat Kota Bekasi, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi narkoba di Kota Bekasi. Adapun hasil yang didapat adalah memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat akan bahaya narkoba.
- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kerukunan beragama. Adapun hasil yang didapat adalah membangun sinergitas antara pemerintah daerah bersama dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bekasi.

**e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

**1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**

- **Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan**



**Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 400 Orang.

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 845.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
  - Sosialisasi Orang Asing. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah tertibnya administrasi orang asing di Kota Bekasi.
  - Pelatihan dasar Intelejen Kasie Trantib Kecamatan dan Kelurahan. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan Kantrantibmas secara rutin di Kota Bekasi.
  - Pembinaan anggota FKDM tingkat Kecamatan. Kegiatan ini memiliki kelompok sasaran yang berasal dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bekasi, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah Permendagri Nomor 46 Tahun 2019, dan lembaga yang bernaung di Bakesbangpol, maka berkewajiban untuk memfasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam menjalankan fungsi dan roda kelembagaan FKDM sesuai dengan pedoman peranan yang ada di dalam amanah Permendagri tersebut. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai lembaga yang di bentuk pemerintah yang mempunyai tugas utama yaitu menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban melalui menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dalam bentuk tindakan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif.

- **Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 12 Laporan.
- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 650.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
  - Jumlah Laporan Hasil Kewaspadaan Dini Daerah. Adapun hasil yang didapat yaitu fasilitasi penyelenggaraan Tim kewaspadaan dini daerah selama 12 Bulan dan terlaksananya kewaspadaan dini daerah di Kota Bekasi. Fokus kegiatan ini adalah melakukan deteksi dini dan pemetaan keamanan wilayah Kota Bekasi.

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023**

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan RENJA-PD berpedoman pada RENSTRA Badan Kesbangpol Kota Bekasi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RENJA-PD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. RENJA-PD yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 ini dengan program dan kegiatan serta pagu indikatif mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1

**Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		APBD 2023 (Murni)	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
			Semula	Menjadi		RKPD 2023 Perubahan (Sebelum Evaluasi Gubernur)	RKPD 2023 Perubahan (Hasil Evaluasi Gubernur)			Nasional			Daerah				
8																	
8	1					27.091.809.600	47.509.419.473	85.390.004.473									
8	1	1				100 %	100 %	10.080.671.740	10.079.397.613	10.079.397.613							
8	1	1	2.01			100 %	100 %	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.02			100 %	100 %	8.897.620.000	8.897.620.000	8.897.620.000							
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1080 Orang/bulan	1080 Orang/bulan	8.894.620.000	8.894.620.000	8.894.620.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.05			100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	20.000.000							
8	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.06			100 %	100 %	330.000.000	330.000.000	330.000.000							
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	170.000.000	170.000.000	170.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
			Semula	Menjadi	APBD 2023 (Murni)	RKPD 2023 Perubahan (Sebelum Evaluasi Gubernur)	RKPD 2023 Perubahan (Hasil Evaluasi Gubernur)			Nasional			Daerah				
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	250 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	<b>550.051.740</b>	<b>548.777.613</b>	<b>548.777.613</b>						
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	550.051.740	548.777.613	548.777.613	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	<b>280.000.000</b>	<b>280.000.000</b>	<b>280.000.000</b>						
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	2			<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50 %	50 %	<b>2.211.580.860</b>	<b>2.611.580.860</b>	<b>2.611.580.860</b>						
8	1	2	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	100 %	100 %	<b>2.211.580.860</b>	<b>2.611.580.860</b>	<b>2.611.580.860</b>						
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	690 Orang	840 Orang	2.211.580.860	2.611.580.860	2.611.580.860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase Pendidikan Politik Daerah	5 %	5 %	<b>3.549.357.000</b>	<b>23.268.241.000</b>	<b>61.148.826.000</b>						
8	1	3	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang</b>	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Politik di Kota Bekasi	970 Orang	970 Orang	<b>3.549.357.000</b>	<b>23.268.241.000</b>	<b>61.148.826.000</b>						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2023		Pagu Indikatif			Prioritas									
			Semula	Menjadi	APBD 2023 (Murni)	RKPD 2023 Perubahan (Sebelum Evaluasi Gubernur)	RKPD 2023 Perubahan (Hasil Evaluasi Gubernur)	Lokasi	Sumber Dana			Nasional	Daerah				
8	1	3	2.01	1	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen	11 Dokumen	2.268.321.000	21.987.205.000	59.867.790.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2260 Orang	2260 Orang	1.246.880.000	1.246.880.000	1.246.880.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	34.156.000	34.156.000	34.156.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	4			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang di bina	100 %	100 %	<b>8.955.000.000</b>	<b>9.255.000.000</b>	<b>9.255.000.000</b>						
8	1	4	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertiba administrasi di Kota Bekasi	24 Ormas/LSM	24 Ormas/LSM	<b>8.955.000.000</b>	<b>9.255.000.000</b>	<b>9.255.000.000</b>						
8	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	24 Dokumen	26 Dokumen	8.655.000.000	8.955.000.000	8.955.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	300 Orang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	5			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Cakupan Masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan	0,18 %	0,18 %	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
			Semula	Menjadi	APBD 2023 (Murni)	RKPD 2023 Perubahan (Sebelum Evaluasi Gubernur)	RKPD 2023 Perubahan (Hasil Evaluasi Gubernur)			Nasional			Daerah				
		pengembangan ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya															
8	1	5	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Jumlah Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	800.000.000	800.000.000	800.000.000						
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1250 Orang	1350 Orang	800.000.000	800.000.000	800.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Pelajar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Stakeholder terkait	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	6			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	100 %	100 %	1.495.200.000	1.495.200.000	1.495.200.000						
8	1	6	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Persentase Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Bekasi	100 %	100 %	1.495.200.000	1.495.200.000	1.495.200.000						
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	400 Orang	845.200.000	845.200.000	845.200.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Forum Bentukan Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	650.000.000	650.000.000	650.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	Forum Bentukan Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
<b>TOTAL</b>									<b>27.091.809.600</b>	<b>47.509.419.473</b>	<b>85.390.004.473</b>						

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan**

Penetapan program dan kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melakukan perumusan Renja, kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi dijadikan rujukan utama di dalam proses penyusunan. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Renja ini adalah prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Inti dari penyusunan Renja ini adalah optimalisasi pencapaian hasil dari upaya Perangkat Daerah per tahun anggaran. Selain itu, Renja mempunyai posisi penting di dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronasi antar kegiatan yang ada di dalam satu program, maupun kegiatan-kegiatan yang berlainan program. Oleh karenanya, untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan sharing informasi dari Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah. Melalui penyusunan Renja lah sharing informasi itu dapat dilaksanakan.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan terdapat kendala, baik dalam proses pelaksanaan fisik dan anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan kerja. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan yang terlebih dahulu dilakukan proses keselarasan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan.

Salah satu dasar adanya Renja Perubahan pada tahun 2023 yaitu adanya catatan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) terkait dengan adanya Surat edaran Nomor 9000.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dalam point C Nomor 2 (a) dan (b) yang berisikan tentang prosentase penganggaran Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD; dan



b. Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan dasar Surat Edaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menyesuaikan NPHD kepada Lembaga yang menjadi penyelenggara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024, sebagaimana berikut :

1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Nomor : 774/Kesbangpol.Poldagri dan Nomor : 593/PR.08-PKS/3275/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024, dengan rincian :

- Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024 pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 36.496.000.000,-

- Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 54.744.000.000,-

Jumlah Total Dana KPU pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 91.240.000.000,-

2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bekasi, Nomor : 775/Kesbangpol.Poldagri dan Nomor : 79/HK.02/K.JB-21/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024, dengan rincian :

- Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.506.585.000,-

- Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.728.388.000,-

Jumlah Total Dana BAWASLU pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp. 22.234.973.000,-

## B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2023. Untuk menyusun Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ini, setiap tahapan perencanaan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan. Dimulai dari penjaringan usulan yang berasal dari Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan hingga Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi. Pada setiap tahapan perencanaan yang dijalani, memungkinkan terjadinya kesalahan maupun distorsi maksud atau tujuan dari usulan. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2023, Badan Kesbangpol Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Renja ini.

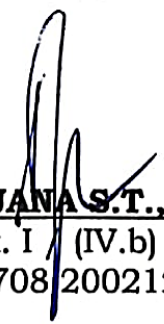
## C. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu meningkatkan pemahaman dan penguatan fungsi deteksi dini dari setiap aparatur Badan Kesbangpol. Hal ini diperlukan untuk melakukan analisa kerawanan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu tahapan preventif maupun rehabilitasi;
2. Perlu meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan rasa solidaritas dan tenggang rasa di masyarakat Kota Bekasi;
3. Aparatur Badan Kesbangpol yang ada saat ini dari sisi kualitas masih kurang, sehingga akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penambahan jumlah pegawai;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam proses pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bekasi,

2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BEKASI,**

  
**NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE**  
Pembina Tk. I (IV.b)  
NIP. 19740708/200212 1 007

**RINCIAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN EVALUASI GUBERNUR)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>PAGU ANGGARAN (MURNI)</b>	<b>PAGU ANGGARAN (PERUBAHAN SEBELUM EVALUASI GUBERNUR)</b>	<b>PAGU ANGGARAN (PERUBAHAN SETELAH EVALUASI GUBERNUR)</b>
1	BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN (BLPU)	Rp. 10,080,671,740,-	Rp. 10,079,397,613,-	Rp. 10,079,397,613,-
2	BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)	RP. 6,087,816,860,-	RP. 6,487,816,860,-	RP. 6,487,816,860,-
3	BELANJA HIBAH (HIBAH BANTUAN PARTAI POLITIK, HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN HIBAH FASILITASI LEMBAGA PEMERINTAH)	Rp. 10,923,321,000,-	Rp. 30,942,205,000,-	RP. 68,822,790,000,-
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>Rp. 27,091,809,600,-</b>	<b>Rp. 47,509,419,473,-</b>	<b>Rp. 85,390,004,473,-</b>